

**Direktorat Jenderal
Badan Peradilan
Umum**



REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2026



**Rencana Kinerja Tahunan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun 2026**

Rencana Kinerja Tahunan dituangkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran, kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum yang Agung”

Dengan Misi :

1. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum
2. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Umum
3. Meningkatkan Transformasi Digital Manajemen Pelayanan Yang Berkeadilan

Capaian sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026 tertuang dalam lampiran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2026.

**REVISI RENCANA KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2026**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktul.	96 Persen
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96 Persen
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 Persen
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada	85 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		para pihak di lingkungan peradilan umum	
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	66 Persen
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	69 Persen
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 Persen
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45 Persen
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4.2 Persen
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5 Persen
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 Persen
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum .	99 Persen
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	85 Persen
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	19 Persen
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	lingkungan Peradilan Umum yang optimal		
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.3 Indeks
4.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.8 Nilai
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85 Nilai
		3. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Jakarta, 06 November 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



BAMBANG MYANTO

